

**PERAN PENDAMPING DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANAGAN (KUKMP) DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM SEBELUM DAN DI MASA PANDEMI
COVID-19 DI KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO**



Skripsi

**Diajukan Kepada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Disusun Oleh:

Rahma Afni Ardhivani

NIM. 18102030043

Pembimbing:

Beti Nur Hayati, M.A.

NIP. 19931012 2019 03 2011

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1314/Un.02/DD/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PENDAMPING DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN (KUKMP) DALAM PEMBERDAYAAN UMKM SEBELUM DAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMA AFNI ARDHIYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 18102030043
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Beti Nur Hayati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 66b43e517a8f



Penguji I
Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66c2e1f403e91



Penguji II
Muhamad Rashif Hilmi, S.Si., M.Sc.
SIGNED

Valid ID: 66c2e2570ba3



Yogyakarta, 09 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 66c894eac86ed

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma Afni Ardhiyani
NIM : 18102030043
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Pendamping Dinas KUKMP dalam Pemberdayaan UMKM Sebelum dan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarism dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juli 2024

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA



Rahma Afni Ardhiyani
NIM. 18102030043

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Rahma Afni Ardhiyani
NIM : 18102030043
Judul Skripsi : PERAN PENDAMPING DINAS KUKMP DALAM PEMBERDAYAAN
UMKM SEBELUM DAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN BUTUH,
KABUPATEN PURWOREJO


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 22 Juli 2024

Pembimbing, Mengetahui:
Ketua Prodi,


Beti Nur Hayati, M.A.
NIP. 19931012 2019 03 2011


Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 19830811 201101 2 010

INTISARI

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan usaha yang bukan termasuk ke dalam usaha besar dan biasanya dilakukan perorangan. Keberadaan UMKM di Kecamatan Butuh telah ada sejak lama, namun masih belum ada pendamping di wilayah Kecamatan Butuh. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) memberikan pendamping untuk membantu proses pemberdayaan UMKM di Kecamatan Butuh. Kegiatan pendampingan oleh Dinas KUKMP di Kecamatan Butuh dimulai tahun 2019, namun pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi kegiatan UMKM dan pendampingan karena adanya pembatasan kegiatan. Penelitian ini mencoba menganalisis peran pendamping Dinas KUKMP dalam melakukan upaya pemberdayaan UMKM di Kecamatan Butuh baik sebelum pandemi maupun selama pandemic covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan peran pendamping Dinas KUKMP serta dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM dalam upaya meningkatkan kualitas pelaku dan produk UMKM. Adapun dalam pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam analisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan peran yang dilakukan oleh pendamping Dinas KUKMP dalam meningkatkan kualitas UMKM di Kecamatan Butuh baik sebelum maupun selama masa pandemi. Terdapat 6 peran yang dilakukan pendamping, sebelum pandemi, yaitu memberikan semangat, peran fasilitasi kelompok, peran dalam menyampaikan informasi, peran memberikan pelatihan, peran membangun jaringan relasi dan peran dalam membantu administrasi. Sementara itu, peran pendamping selama pandemi yaitu fasilitasi bantuan UMKM, peran memberikan pelatihan dan membantu meningkatkan penjualan. Penelitian ini juga menjelaskan dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM setelah pendampingan baik di sebelum pandemi maupun di masa pandemi. Dampak pendampingan sebelum pandemi yaitu kemudahan akses perizinan, peningkatan kualitas kemasan produk, meluasnya pasar, memperluas relasi, peningkatan penjualan dan peningkatan pendapatan. Adapun dampak pendampingan selama masa pandemi yaitu mampu bertahan di masa pandemi, kemampuan digitalisasi dan meluasnya akses pasar.

Kata Kunci: Peran, Pendamping Dinas KUKMP, Pemberdayaan UMKM

ABSTRACT

MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) are businesses that are not included in large businesses and are usually carried out by individuals. The existence of MSMEs in Butuh District has existed for a long time, but there is still no companion in the Butuh District area. The Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises and Trade (KUKMP) provides assistance to assist the process of empowering MSMEs in Butuh District. Mentoring activities by the KUKMP Office in Butuh District began in 2019, but in 2020 the Covid-19 pandemic occurred which had an impact on MSME activities and mentoring due to restrictions on activities. This study tries to analyze the role of the KUKMP Office in making efforts to empower MSMEs in Butuh District both before the pandemic and during the covid-19 pandemic.

This study uses a qualitative method to explain the role of the KUKMP Office as well as the impact felt by MSME actors in an effort to improve the quality of MSME actors and products. As for data collection, researchers use observation, interviews and documentation. In data analysis, the researcher uses data reduction, data presentation and conclusion drawn.

The results of this study are to explain the role played by the KUKMP Office assistants in improving the quality of MSMEs in Butuh District, both before and during the pandemic. There are 6 roles that companions do, before the pandemic, namely providing encouragement, the role of group facilitation, the role of conveying information, the role of providing training, the role of building a relationship network and the role of assisting the administration. Meanwhile, the role of companions during the pandemic is to facilitate MSME assistance, provide training and help increase sales. This research also explains the impact felt by MSME actors after mentoring both before the pandemic and during the pandemic. The impact of assistance before the pandemic was ease of access to licensing, improvement in product packaging quality, market expansion, expanding relationships, increasing sales and increasing revenue. The impact of assistance during the pandemic is being able to survive the pandemic, digitization capabilities and expanding market access.

Keywords: Role, KUKMP Office assistants, MSMEs Empowerment

MOTTO

‘Cause there were pages turned with the bridges burn, everything you lose is a step you take.

Taylor Swift



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang atas rahmat serta karunia-Nya telah mengizinkan penulis untuk berjuang sampai saat ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhirnya.

Selesainya tugas akhir yang penulis usahakan selama beberapa tahun terkahir, penulis mempersembahkan tugas akhir ini kepada Ibunda tercinta, **Supaini** yang selalu memberikan semangat, nasihat dan doa yang tiada pernah terputus. Persembahan kedua, yaitu untuk Ayahanda saya, **Maftuh** yang tak pernah menuntut mengenai tugas akhir saya. Tugas akhir ini juga saya persembahkan untuk Kakak saya tercinta, **Luluk Afni Prambandani** yang telah memberikan dukungan moriil dan materill selama masa perkuliahan hingga tugas akhir ini selesai.

Terimakasih untuk seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan, doa, nasihat dan lain sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Pendamping Dinas KUKMP dalam Pemberdayaan UMKM Sebelum dan Di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo” dengan baik. Shalawat serta dalam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat dan dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini dengan tepat waktu tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. M.A selaku rector Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Marhumah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta jajarannya.
3. Ibu Siti Aminah, S. Sos.I., M.Si, selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan izin penulis melakukan penelitian.
4. Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat, arahan dan dukungan selama masa perkuliahan.
5. Ibu Beti Nurhayati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dengan penuh keikhlasan dan

kesabaran, memberikan arahan, nasehat serta tenaga, waktu dan pikirannya hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Maftuh dan Ibu Supaini selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan secara materi maupun non materi juga selalu memberi semangat dan doa yang tak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Mba Luluk Afni Prambandani dan Iwan Purnawan selaku keluarga yang telah memberikan dukungan materiil, non materiil, semangat dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
8. Keluarga penulis, Hanum Yuniatika Ristia, Dyah Septi Malida, Afkul Lufita Agustin, Galih Ibnu Yulindra, Kurnia Nur Hikmah, Gilang Wahyu Tirta, Bukli Dafiq Mawwana, Bulek Miftahul Jannah, Bulek Kunti Rozaqoh yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan selama masa skripsi.
9. Teman-teman penulis, Nurilkaunaini Sidna, Ovita Riski Amalia, Prapti Hartati, Nurul Istiqomah, Wafirotul Laila, Rofiqotul Ummah, Muwafiqo Zamzami Dhuha yang banyak mendengarkan berbagai cerita keresahan dan memberikan semangat kepada penulis selama ini
10. Seluruh narasumber, Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo, Pendamping Dinas KUKMP Kecamatan Butuh Ibu Sari dan Ibu Istiqomah yang menerima peneliti dengan baik, seluruh pelaku UMKM Kecamatan Butuh yang meluangkan waktu untuk berbagi informasi dalam proses pencarian data sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

11. Astri, Mba Lia, Eli, Khabibaturrohmah yang banyak membantu memberikan semangat serta membantu kebingungan penulis selama masa skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Angkatan 2018 yang telah memberikan banyak kenangan dan cerita selama masa perkuliahan. Semoga sukses dengan jalan cerita masing-masing.
13. Keluarga Panwaslu Kecamatan Butuh Pemilihan Serentak 2024 dan Keluarga PPS Wareng Pemilu Serentak 2024 yang memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Alhamdulillah, dengan segala bantuan dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Semoga dapat memberikan motivasi dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah dilakukan. Sebelumnya, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan pada penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan selanjutnya.

Yogyakarta, 22 Juli 2024

Penulis,

Rahma Afni Ardhiyani

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
INTISARI	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	9
G. Kajian Teori	12
H. Metode Penelitian	29
I. Sistematika Pembahasan	38
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS KUKMP KABUPATEN PURWOREJO, KECAMATAN BUTUH DAN KONDISI UMKM KECAMATAN BUTUH	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	39
2. Gambaran Kecamatan Butuh	42
3. Pendampingan UMKM di Kecamatan Butuh	43
BAB III PERAN DAN DAMPAK PENDAMPING DINAS KUKMP DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KECAMATAN BUTUH SEBELUM DAN DI MASA PANDEMI COVID – 19.....	47
A. Peran Pendamping Dinas KUKMP Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kecamatan Butuh Sebelum dan Di Masa Pandemi	47

1. Peran Pendamping Dinas KUKMP Kecamatan Butuh Sebelum Pandemi	50
2. Peran Pendamping Dinas KUKMP di Masa Pandemi Covid-19	66
B. Dampak Pendampingan Dinas KUKMP di Kecamatan Butuh Sebelum dan Di Masa Pandemi Covid-19	75
1. Dampak Pendampingan Dinas KUKMP Sebelum Pandemi	75
2. Dampak Pendampingan Dinas KUKMP Selama Pandemi	80
C. Pembahasan Penelitian	85
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98
1. Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber Data Primer/Informan Utama	33
Tabel 2. 1 Peningkatan jumlah tenant terpilih Kecamatan Butuh.....	45
Tabel 3. 1 Perbedaan Peran Pendamping Sebelum Pandemi dan Di Masa Pandemi.....	74
Tabel 3. 3 Dampak Peran Pendamping Dinas KUKMP Sebelum dan Di Masa Pandemi Covid-19	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas KUKMP.....	41
Gambar 2. 2 Peta Kecamatan Butuh	43
Gambar 2. 3 Kegiatan Bazar UMKM	46
Gambar 3. 1 Fasilitasi Kemudahan Perizinan	52
Gambar 3. 2 Kegiatan Pertemuan Rutin Paguyuban Tumpeng Sewu.....	54
Gambar 3. 3 Penyampain Infromasi oleh Pendamping.....	56
Gambar 3. 4 Kegiatan konsultasi pendamping bersama Bapak Camat.....	57
Gambar 3. 5 Pelatihan Desain Kemasan.....	60
Gambar 3. 6 Gebyar Pelatihan Perizinan UMKM di Pendopo Kecamatan Butuh	62
Gambar 3. 7 Kegiatan Bazar di Art Center Purworejo	65
Gambar 3. 8 Kemampuan Pendamping dalam Menggunakan Komputer.....	66
Gambar 3. 9 FGD bersama Dinas KUKMP.....	70
Gambar 3. 10 Bimbingan Teknis Digital Marketing	72
Gambar 3. 11 Pameran dan Pasar Murah di Pendopo Kecamatan Butuh.....	73
Gambar 3. 12 Sertifikasi Haal dan PIRT	76
Gambar 3. 13 Perbedaan kualitas kemasan sebelum dan sesudah pendampingan.....	77
Gambar 3. 14 Konten promosi sebagai dampak pelathan digitalisasi	82



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini yaitu Peran Pendamping Dinas KUKMP dalam Pemberdayaan UMKM Sebelum dan Di Masa Covid-19 di Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo. Guna menghindari kesalahan pemahaman mengenai skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah dalam judul di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Pendamping Dinas KUKMP

Peran menurut KBBI memiliki makna perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹ Setiap orang mempunyai bermacam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Peran erat kaitannya dengan kedudukan atau status. Peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang semestinya dilakukan (hak dan kewajiban) yang merupakan dampak dari adanya status yang diberikan.

Pendamping Koperasi dan UMK adalah orang dan atau Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan. Pendampingan yang dimaksud adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan UMK melalui bimbingan, konsultasi dan advokasi yang dilakukan oleh pendamping.²

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Perdagangan merupakan Lembaga pemerintah yang membantu Bupati dalam hal yang berkaitan dengan permasalahan maupun pemberdayaan koperasi, usaha kecil mikro dan perdagangan.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peran>, diakses tanggal 11 Januari 2021

² Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Dari pengertian di atas, hal yang ingin dibahas oleh peneliti adalah peran pendamping Dinas KUKMP dalam melaksanakan peran dan tugasnya untuk mengembangkan UMKM di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo.

2. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan merupakan sebuah usaha untuk membangun kemampuan masyarakat dengan memberikan dorongan atau motivasi dan melakukan penyadaran kepada masyarakat mengenai potensi yang dimiliki, serta upaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi suatu tindakan yang nyata.³

Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung satu usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.⁴ Dapat dikatakan UMKM merupakan usaha yang bukan bagian dari usaha lain dan dijalankan oleh perorangan ataupun sebuah badan usaha.

Berdasarkan penjelasan di atas, menyimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan dan memberdayakan usaha mikro dan sejenisnya agar dapat bertahan dan berkembang lebih baik.

³ Sriharini, *Bekal Bekal Fasilitator Handal Membangun Masyarakat Sejahtera* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2020), hlm. 5-6

⁴ Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

B. Latar Belakang

Usaha Kecil, Mikro dan Menengah menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung satu usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud pada undang-undang tersebut.⁵ UMKM merupakan bentuk usaha yang biasanya dilakukan secara perorangan dan tidak memerlukan modal usaha yang besar. UMKM sendiri telah memiliki sejarah yang panjang dalam perekonomian Indonesia, salah satunya saat krisis moneter Indonesia yang mengakibatkan lemahnya perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi yang terjadi di negara kita, dimana ketika banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya, dan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai daya tahan yang tinggi, sehingga mampu menopang ekonomi saat krisis moneter. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja serta berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.⁶

Diawal tahun 2020 Indonesia mengalami serangan wabah Covid-19. Sejak pengumuman kasus pertama di Indonesia, pandemi terus meluas dengan cepat. Di Indonesia wabah ini telah menginfeksi 4 juta lebih penduduk Indonesia.⁷ Pemerintah

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁶ Liez Maria Hamzah dan Devi Agustin, "Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8:2, Juli 2019, hlm. 128

⁷Satgas Covid, <https://covid19.go.id/>, diakses tanggal 20 Desember 2021

dalam mengatasi pandemi mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau social distancing sejak awal Maret 2020 melalui PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kebijakan PSBB guna mencegah virus yang semakin menyebar. Sementara itu, menurut Kementerian Kesehatan RI, PSBB tak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat, pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi Covid-19.⁸ Kebijakan ini memberikan dampak pada kegiatan sehari-hari masyarakat seperti membatasi kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan di tempat umum dan kerja, serta diliburkannya sekolah dan universitas. Kebijakan ini memberikan dampak diberbagai sector, salah satunya perekonomian. Berdasarkan Berita Resmi Statistik, besaran PDB triwulan I-2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari 5.07 persen (tahun 2019) menjadi 2,09 persen. Akibat pandemi ini Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp320 triliun di triwulan I-2020.⁹

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang sangat terdampak pandemi Covid-19. Tercatat sebanyak 53.7% UMKM tanah air mengalami penurunan usaha sampai dengan 50%.¹⁰ UMKM adalah pelaku utama yang mendominasi perekonomian Indonesia. UMKM sebagai pahlawan atau penopang perekonomian Indonesia, terlihat dari jumlahnya yang terus meningkat pasca krisis ekonomi 1997-1998. Sebanyak 64.2 juta UMKM di Indonesia (99% dari unit usaha) tercatat pada tahun 2018 dan memiliki tenaga kerja sebanyak 116.98 juta orang (97%

⁸ Syahrial, "Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia", *Jurnal Ners*, Vol. 4:2, 2020 hlm. 22

⁹ Diah Caherani, Melda Noereast Talytha, Tony Perdana, Endang Rusyaman dan Nurul Gusriani, "Pemetaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Analisis Media Sosial Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan", *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 9:4, Desember 2020, hal. 276

¹⁰ Maikel Jefriando, "Pak Jokowi Tolong! Situasi UMKM RI Masih Kritis", <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20211209104437-25-297878/pak-jokowi-tolong-situasi-umkm-ri-masih-kritis>, diakses tanggal 25 Desember 2021.

dari total tenaga kerja di sector ekonomi).¹¹ Pada tahun 2019 UMKM berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 119.6 juta atau 96.92% dari tenaga kerja di seluruh Indonesia. Penyerapan jumlah tenaga kerja dari UMKM meningkat sebesar 2.21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.¹² Selain mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, UMKM juga menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) di Indonesia. Sebanyak 60 persen Produk Domestik Bruto Indonesia berasal dari UMKM.

Meskipun mengalami penurunan usaha di masa pandemi, namun UMKM membuktikan diri mampu bertahan di tengah pandemi. UMKM masih sanggup beroperasi. Pemberdayaan UMKM dewasa ini mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak, baik pemerintah, perbankan, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun lembaga-lembaga internasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi UMKM yang perlu diefektifkan sebagai motor penggerak perekonomian setelah mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan.¹³ Di masa pemulihan ekonomi saat ini, UMKM menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional. UMKM memiliki potensi untuk menjadi penopang perekonomian dan pembangkit ekonomi di masa pemulihan ekonomi nasional.

Selain berdampak kepada perekonomian, pandemi juga berdampak terhadap meningkatnya pengangguran akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa perusahaan mengambil langkah-langkah ekstrim untuk mempertahankan bisnis dan mengurangi resiko kerugian akibat dampak

¹¹ Ibid., “Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, hlm. 276

¹² Dwi Hadya Jayani, “Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Terus Meningkat”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi-terus-meningkat>, diakses tanggal 11 Januari 2021

¹³ Sudjinar dan Juwari, “Pemberdayaan Potensi Masyarakat Melalui Pendampingan UMKM dan Koperasi di Kelurahan Telaga Sari Kota Balikpapan”, *Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Ekonomi*, Vol. 1:1 2018, hlm. 41

pemberlakukan PSBB. Berdasarkan pada pemantauan ILO (*International Labour Organization*) karena adanya tindakan karantina penuh dan parsial saat ini sudah berdampak pada hampir 2.7 miliar pekerja, yang mewakili sekitar 81 persen tenaga kerja dunia.¹⁴ Menurut pada catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada penduduk usia 20-21 tahun pada Februari 2021 sebesar 17,66%, jumlah ini meningkat 3,36% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 14,3%. Dalam situasi saat ini, usaha di berbagai sektor ekonomi sedang menghadapi krisis ekonomi yang dapat mengancam operasi dan kesehatan mereka, terutama di antara perusahaan kecil, sementara jutaan pekerja rentan kehilangan pekerjaan dan pendapatan saat mengalami PHK.¹⁵

Dampak pandemi COVID-19 hampir dirasakan di seluruh wilayah di Indonesia, tidak terkecuali provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu provinsi dengan kasus tertinggi di Indonesia. Jumlah sektor usaha di Jawa Tengah saat ini tercatat mencapai 4,3 juta unit, terdiri dari usaha mikro 3.777.843 (90.48%), kecil 354.884 (8.50%), menengah 39.125 (0.94%) dan besar 3.358 (0.08%). Statistik ini jelas menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro-lah yang paling dominan. Menurut Pemprov Jateng, lebih dari 26 ribu UMKM terdampak Covid-19 dan trennya terus bertambah. Mayoritas bergerak di sektor usaha makanan dan minuman, fashion, perdagangan, jasa dan kerajinan tangan. Menurunnya pendapatan masyarakat dan pembatasan sosial yang diikuti sikap kehati-hatian konsumen menyebabkan permintaan sector ini menurun tajam.¹⁶

¹⁴ Syahrial, "Dampak Covid-19 Terhadap", hlm. 22-23

¹⁵ Ibid., hlm. 23

¹⁶ Moh. Anhar, "UMKM Jawa Tengah di Pusaran Pandemi",
<https://mie.feb.undip.ac.id/archives/17245>, diakses tanggal 30 Desember 2021

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah. Sebelum pandemi berlangsung, kebanyakan perekonomian didominasi oleh pertanian. Pekerjaan menurut lapangan usaha penduduk Kabupaten Purworejo umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagian besar didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (25.99%), sedangkan pada sektor industri pengolahan menempati urutan kedua sebesar 18.36%. Namun ketika pandemi melanda dan meningkatnya PHK di kota besar sehingga banyak orang yang kembali pulang agar dapat bertahan hidup. Sebanyak 38.757 pemudik yang pulang ke Purworejo, dan 1.929 berada di Kecamatan Butuh.¹⁷ Beberapa dari mereka yang kemudian membuat usaha agar dapat bertahan hidup. Menurut Kabid UMKM Dinas KUKMP Purworejo, setelah setahun pandemi Covid-19 melanda, jumlah UMKM di Kabupaten Purworejo meningkat pesat. Dari yang sebelumnya sekitar 29.000 kini menjadi 33.000 atau meningkat 4.000 dalam setahun. Hal ini disebabkan banyaknya PHK akibat pandemi, sehingga memutuskan untuk memulai berjualan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari¹⁸. Meskipun begitu, UMKM di Kabupaten Purworejo juga banyak terdampak oleh adanya pandemi. Menurut Kepala Dinas KUKMP dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, terdapat sekitar 26.000 UMKM mengalami penurunan pendapatan rata-rata 58 persen.¹⁹

Dengan jumlah UMKM yang bertambah terutama di tengah pandemi, Dinas KUMKP Purworejo melakukan berbagai upaya untuk memberikan wawasan kepada para pelaku UMKM. Di daerah Butuh memiliki 3 pendamping UMKM yang membantu

¹⁷ Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Purworejo, https://bpbd.purworejokab.go.id/download/file/Laporan_Paripurna_Covid-192_.pdf, diakses tanggal 11 Januari 2021

¹⁸ Yudia Setiandini, "Pandemi Setahun, Pelaku UMKM Purworejo Tambah 4 Ribu Orang", <https://purworejonews.com/2021/03/10/pandemi-setahun-pelaku-umkm-purworejo-tambah-4-ribu-orang/>, diakses tanggal 26 Desember 2021.

¹⁹ Tomy Sudjatmiko, "24 Ribu UMKM di Purworejo Terdampak Covid-19", <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/kebu/24-ribu-umkm-di-purworejo-terdampak-covid-19/>, diakses tanggal 28 Desember 2021

para pelaku UMKM. Di masa pandemi ini, Kecamatan Butuh juga terdampak adanya pandemi covid-19 seperti PHK. Dari PHK tersebut beberapa orang melakukan usaha UMKM untuk bertahan hidup. Pemberdayaan yang dilakukan melalui pendampingan ini diharapkan mampu memberdayakan UMKM agar dapat bersaing di tingkat global serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran dengan menyerap tenaga kerja di sekitarnya. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui *“Peran Pendamping Dinas KUKMP dalam Pemberdayaan UMKM Sebelum dan di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo”*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran yang dilakukan pendamping UMKM dan dampak yang dirasakan pelaku UMKM Kecamatan Butuh baik sebelum pandemi maupun ketika pandemi covid-19.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana peran pendamping UMKM Dinas KUKMP dalam memberdayakan UMKM sebelum dan di masa pandemi Covid-19?
2. Apa dampak pendampingan oleh Dinas KUKMP dalam memberdayakan UMKM sebelum dan di masa pandemi Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan peran pendamping UMKM dalam melakukan pemberdayaan sebelum dan di masa pandemi Covid-19

2. Mendeskripsikan dampak pendampingan Dinas KUKMP dalam memberdayakan UMKM sebelum dan di masa pandemi Covid-19

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai peran pendamping dalam pemberdayaan UMKM.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan mampu memberikan saran kepada pendamping UMKM di Kecamatan Butuh dan sekitarnya guna meningkatkan peran pendamping dalam pemberdayaan UMKM, terutama dalam menghadapi masa new normal, sehingga mampu meningkatkan ekonomi individu maupun masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui keaslian penelitian yang akan dilakukan, maka perlu disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang fokus perhatiannya berkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul *Pengaruh Pelatihan, Pendampingan dan Pembinaan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Pendapatan UMKM (Studi Pada Peserta Home Business Camp)*,²⁰ karya Meida Nur Rahma, ia meneliti mengenai dukungan pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas UMKM dengan mengadakan berbagai pelatihan dan pembinaan terhadap para pelaku UMKM di Kota Yogyakarta. Pada penelitian karya Meida Nur Rahmi berfokus kepada kegiatan

²⁰ Meida Nur Rahma, “*Pengaruh Pelatihan, Pendampingan dan Pembinaan Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Pendapatan UMKM (Studi Pada Peserta Home Bussiness Camp*”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2018)

pendampingan, pelatihan dan pemberian motivasi untuk meningkatkan kualitas pelaku UMKM, terutama pada sumber daya manusianya dengan pemberian motivasi, pembinaan, pelatihan dan pendampingan oleh pemerintah kota Yogyakarta. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus kepada peran pendamping UMKM di kecamatan Butuh, kabupaten Purworejo yang telah direkrut oleh pemerintah dalam membantu berkembangnya UMKM terutama di tengah pandemi Covid-19.

Kedua, yaitu skripsi berjudul *Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Masa Covid-19: Studi Pada Bakpia Madania di Yayasan Madania*²¹, karya Febry Eko Nurcahyo. Dalam penelitiannya, ia meneliti mengenai hasil pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 Bakpia Madania di Yayasan Madania, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah bagaimana peran pendamping UMKM dalam melaksanakan pemberdayaan selama pandemi Covid-19.

Ketiga, Jurnal berjudul *Pendampingan UMKM dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terdampak Pandemi Covid-19 Di Area Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto Dalam Menjalankan Contactless Business*²² karya Bima Cinintya Pratama, Maulida Nurul Innayah dan Akhmad Darmawan. Penelitian dalam jurnal ini merupakan bentuk program pengabdian dalam membantu UMKM dalam menghadapi pandemi Covid-19, utamanya kepada para PKL di wilayah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pengabdian ini membantu menjaga keberlangsungan perekonomian dan kesejahteraan UMKM di masa pandemi melalui *contactless business*. Hal ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dimana pendampingan

²¹ Febry Eko Nurcahyo, "*Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Covid-19: Studi Pada Bakpia Madania di Yayasan Madania*", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2021).

²² Bima Cinintya Pratama dkk., "Pendampingan UMKM dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terdampak Pandemi Covid-19 Di Area Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto Dalam Menjalankan Contactless Bussiness", *Jurnal Budimas*, Vol. 3:1, 2021

dilakukan oleh pendamping Dinas KUKMP. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan bukan hanya disaat pandemi tetapi juga sebelum di pandemi berlangsung.

Keempat, jurnal *Analisa Kinerja Pendamping Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Terhadap Kemajuan UMKM*²³ karya Novfitri Landong Namora Suhombing dan Raden Hasan. Penelitian ini mendeskripsikan tentang kinerja pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Tangerang Selatan dalam membantu UMKM memecahkan berbagai permasalahan. Dalam penelitian di tersebut juga menggunakan metode kuantitatif untuk melihat kinerja pendamping UMKM dalam melakukan pendampingan. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif serta membahas mengenai peran dalam memberdayakan UMKM di masa pandemi Covid-19.

Kelima, jurnal dengan judul *Pendampingan UMKM Dalam Meningkatkan Hasil Produksi dan Hasil Penjualan Opak Makanan Khas Jawa Barat*²⁴, karya Opan Arifudin, Fenny Damayanti Rusmana, Rahman Tanjung. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai program pendampingan yang dilakukan untuk membantu meningkatkan produksi dan dilakukan melalui pengabdian masyarakat bukan oleh pendamping UMKM dari Dinas KUKMP. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas mengenai bagaimana peran pendamping Dinas KUKMP dalam membantu memberdayakan UMKM di Kecamatan Butuh.

²³ Nivfitri Landong Namora Suhimbing dan Raden Hasan, “Analisa Kinerja Pendamping Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Terhadap Kemajuan UMKM”, *JIM UPB*, Vol. 7:2, 2019

²⁴ Opan Arifudin dkk., “Pendampingan UMKM Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Dan Hasil Penjualan Opak Makanan Khas Jawa Barat”, *Jurnal Karya Abadi*, Vol. 4:1 2020

G. Kajian Teori

Kerangka teori memiliki tujuan untuk membantu menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman tugas akhir ini maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul di atas:

1. Peran Pendamping Dinas KUKMP

a. Pengertian Peran

Teori peran membahas mengenai istilah “peran” yang umumnya digunakan dalam dunia peran/teater, yang dimana seorang aktor harus memerankan tokoh tertentu dan ketika memerankan tokoh tersebut diharapkan berperilaku sesuai dengan perannya.

Menurut Buce J. Cohen peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Menurut Katz dan Kahn peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal ini didasarkan pada fungsi-fungsi yang dilakukan untuk menunjukkan kedudukan dan karakter dari setiap individu. Dalam Bahasa Inggris peranan “*role*” memiliki arti “*person task or duty in undertaking*”. Peran diartikan sebagai tingkah yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang memiliki kedudukan, sedangkan peranan adalah bentuk tindakan seseorang dalam suatu kondisi atau peristiwa.²⁵

Ralph dan Rinton menjelaskan bahwa posisi dalam pergaulan masyarakat menentukan peranan yang menempel pada diri seseorang. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan tempat individu dalam masyarakat, sedangkan peranan lebih menunjuk kepada fungsi,

²⁵ Afriadi, “Peranan Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung”, Thesis (Lampung: Program Pascasarjana, UIN Raden Intan, 2018), hlm. 22

penyesuaian diri dan suatu proses. Dapat dikatakan bahwa posisi seseorang didalam masyarakat menunjukkan peranan yang harus dijalankannya. Dalam masyarakat seseorang dapat memiliki lebih dari satu posisi dan peranan, hal ini disebut sebagai “*status set*” atau seperangkat status.²⁶ Misalnya sebagai pendamping atau fasilitator tidak hanya memiliki satu peranan, tetapi terdapat status set sebagai pendamping yaitu, pendidik, penggerak, konsultan, mediator dan lain sebagainya.

1) Aspek – Aspek Peran

Terdapat beberapa istilah dalam teori peran, Buddle dan Thomas menjelaskan terdapat empat golongan:²⁷

1. Orang - orang yang mengambil peran dalam interaksi sosial atau orang yang berperan

Terdapat 2 golongan orang-orang yang mengambil peran:

- Aktor atau pelaku, yaitu individu yang sedang menjalankan perilaku peran tertentu.
- Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang berhubungan dengan aktor dan perilakunya.

Baik target maupun aktor keduanya dapat berupa individu maupun kelompok. Dapat dikatakan bahwa, teori peran digunakan untuk menganalisis hubungan antara individu dan individu atau individu dengan kelompok. Cooley dan Mead menjelaskan bahwa hubungan antara target dan aktor yaitu untuk membentuk identitas aktor yang dipengaruhi oleh penilaian atau sikap dari orang lain (target).²⁸ Dalam penelitian ini,

²⁶ Ibid., hlm. 23

²⁷ <http://digilib.uinsby.ac.id/18163/5/Bab%202.pdf>, hlm. 25-35

²⁸ Ibid.

dapat dikatakan hubungan aktor dan target yang terjadi yaitu adanya pendamping Dinas KUKMP sebagai aktor yang kemudian dipengaruhi oleh penilaian target yaitu pelaku UMKM.

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi

Biddle dan Thomas membagi indikator dalam peran dalam lima indikator:

- Harapan (expectation)

Harapan mengenai peran adalah harapan orang mengenai perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang sedang menjalankan peran tertentu. Harapan ini dapat berupa harapan kelompok atau perorangan semata.

- Norma (Norm)

Secord dan Backman berpendapat bahwa norma juga merupakan salah satu bentuk sebuah harapan. Ia menjelaskan terdapat 2 jenis harapan:²⁹

a. Harapan yang bersifat meramalkan atau harapan terhadap perilaku yang akan terjadi

b. Harapan normative (role expectation) yaitu kewajiban untuk sesuai dengan peran yang dijalankan. Harapan ini dibagi menjadi 2 yaitu harapan terselubung, yaitu harapan yang tidak selalu diucapkan tetapi ada. Dan harapan terbuka yaitu harapan yang diucapkan atau bisa juga dikatakan sebagai tuntutan dari sebuah peran.

- Wujud perilaku dalam peran (performance)

Peran diwujudkan oleh aktor melalui perilaku. Wujud perilaku dari peran ini bervariasi dan nyata. Peran dilihat wujudnya berdasar pada tujuan atau hasil, terlepas dari bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Namun, terkadang cara yang dilakukan untuk mencapai hasil tidak sesuai dengan harapan target terdapat actor. Dengan demikian, actor bebas menggunakan cara yang sesuai dengan dirinya asal tidak bertentangan dengan peran yang diharapkan pada actor tersebut.

- Penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction)

Penilaian peran dalam teori peran diartikan sebagai kesan positif maupun negatif yang diberikan oleh orang lain (masyarakat) berdasarkan norma yang berlaku terhadap perilaku yang dilakukan aktor. Sedangkan sanksi dapat diartikan usaha yang dilakukan oleh aktor untuk mempertahankan nilai positif atau usaha agar perwujudan peran diubah nilainya, yang tadinya negatif menjadi positif.

Mertin dan Kitt mengatakan bahwa, setiap kelompok memerlukan kelompok rujukan tertentu dalam memberikan penilaian dan sanksi. Fungsi kelompok rujukan:

- a) Fungsi normative, yaitu kelompok berfungsi memaksakan sebuah standar tertentu dan dijadikan sebagai keyakinan untuk berperilaku oleh anggotanya. Sehingga mau tidak mau actor mengikuti hal tersebut yang kemudian menjadi nilai dalam individu dan berubah menjadi pedoman dalam bertingkah laku.

b) Fungsi komparatif (perbandingan), yaitu kelompok sebagai pembanding untuk mengetahui apakah perilaku yang dilakukan benar atau salah. Kelompok hanya digunakan untuk tujuan normatif.

3. Kedudukan (posisi) setiap individu dalam perilaku

Kedudukan dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang secara kolektif mendapat pengakuan atas perbedaannya dari kelompok lain berdasarkan kesamaan sifat yang mereka miliki, perilaku yang diperbuat atau reaksi orang terhadap mereka.

4. Hubungan antara individu dan perilaku

Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa hubungan yang dapat dibuktikan kekuatannya adalah hubungan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Kriteria untuk menetapkan kaitan-kaitan tersebut diantaranya:

a) Kriteria Kesamaan

1) Diferensiasi yaitu seperti norma untuk anggota kelompok yang berbeda dengan norma yang bukan anggota kelompok. Hubungan keduanya yaitu ditandai adanya ketidaksamaan.

2) Konsensus yaitu hubungan antara perilaku dengan kesepakatan mengenai hal tertentu.

3) Konflik Peran, yaitu adanya perbedaan pandangan mengenai peran. Terdapat dua konflik; peran, yaitu konflik antar peran yang disebabkan ketidakjelasan perilaku antar peran satu dan yang lain pada satu actor, dan konflik dalam peran yaitu perilaku yang diharapkan dari aktor tidak sesuai dengan posisinya.

- 4) Keseragaman, yaitu hubungan dua orang yang memiliki peran yang sama.
- 5) Spesialisasi, yaitu hubungan perilaku seseorang yang berbeda posisi dan peran dalam satu kelompok
- 6) Konsistensi, yaitu hubungan antara perilaku dengan perilaku sebelumnya yang saling menyambung satu sama lain.

b) Derajat Saling Ketergantungan

Derajat ketergantungan yang dimaksud adalah hubungan antara orang dengan perilaku yang dapat mempengaruhi, menyebabkan atau menghambat hubungan orang-perilaku lain. Terdapat dua jenis yaitu rangsangan dan hambatan serta ganjaran dan harga. Rangsangan dan hambatan bahwa perilaku yang dilakukan akan saling memberikan rangsangan dan/atau hambatan terhadap perilaku lain. Sedangkan ganjaran dan harga yaitu terdapat ganjaran dan harga untuk perilaku yang saling berkaitan.

c) Gabungan antara Derajat Kesamaan dan Saling Ketergantungan:

- 1) Konformitas yaitu kesamaan antara perilaku seseorang dengan yang diharapkan oleh orang lain.
- 2) Penyesuaian, yaitu ketidaksesuaian antara perilaku seseorang dengan harapan orang lain.
- 3) Kecermatan, yaitu ketepatan dalam mendeskripsikan suatu peran.

2) Jenis Peran

Menurut Soekanto, ada beberapa jenis peran, diantaranya adalah sebagai berikut:³⁰

a) Peran Aktif

Peran aktif adalah seseorang yang seutuhnya berperan aktif dalam setiap kegiatan atau tindakan dalam organisasi. Hal ini dapat diukur melalui kehadiran dan kontribusi terhadap organisasi. Peran pendamping dapat dilihat keaktifannya melalui kontribusi yang diberikan dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Butuh.

b) Peran Pasif

Peran pasif diartikan sebagai sebuah peran yang tidak dilaksanakan oleh individu yang bersangkutan atau actor. Seorang pendamping yang tidak melakukan perannya dapat diartikan memiliki peran yang pasif.

c) Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang hanya berdasarkan kebutuhan atau pada keadaan tertentu saja. Pendamping yang datang atau melaksanakan tugasnya hanya saat dihubungi atau ketika terjadi masalah dapat dikatakan masuk ke dalam peran partisipatif.

b. Pengertian Peran Pendamping

Pendamping atau sering juga disebut sebagai fasilitator. Fasilitator merupakan pekerja atau pelaksana dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

³⁰ Hargo Dwi Wijayanto, “*Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan*”, Skripsi (Ponorogo: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019), hlm. 8-9

Lippit dan Rogers fasilitator menyebutnya sebagai “agen perubahan (change agent Menurut) yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat yang memiliki kewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Lipit dan Rogers juga berpendapat, fasilitator merupakan seorang professional, dalam artian mempunyai kualifikasi tertentu baik menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam fasilitasi/pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat.³¹

Menurut Sumpeno terdapat beberapa tokoh atau figure yang mempunyai peluang untuk berpartisipasi menjadi pendamping/fasilitator, yaitu ³²

- 1) Pendamping lokal, biasanya terdiri dari tokoh penting dalam masyarakat atau yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan
- 2) Pendamping teknis. Pendamping ini biasanya dipilih dari tenaga penyuluh dari suatu departemen seperti Departemen Sosial dengan Petugas Sosial Kecamatan dan lain sebagainya.
- 3) Pendamping Khusus. Pendamping khusus ini memiliki keahlian khusus dalam menangani masyarakat kurang berdaya dan miskin seperti konsultan pendamping, PPK, P2DTK dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini pendamping yang dimaksud ialah pendamping yang berasal dari Dinas KUKMP (Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan), tepatnya di pendamping yang berada di Kecamatan Butuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran memiliki arti perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran dan kedudukan merupakan hal

³¹ Sriharini, *Bekal Fasilitator Handal Membangun Masyarakat Sejahtera*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2020), hlm. 20

³² Ibid.

yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang disandang seseorang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya.³³

Ife menjelaskan bahwa terdapat peran yang harus dimiliki seorang sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat. Menurutnya paling tidak terdapat 4 peran dan keterampilan tertentu³⁴:

1) Peran dan Keterampilan Memfasilitasi

Keterampilan fasilitator yang perlu dimiliki dalam perannya untuk memfasilitasi diantaranya memberikan semangat sosial, mediasi dan negosiasi, dorongan/dukungan, fasilitasi kelompok, pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya, mengatur komunikasi antar personal dan lain sebagainya. Keterampilan fasilitasi ialah keterampilan untuk mendampingi sehingga memotivasi masyarakat atau kelompok, membantu menyelesaikan konflik baik melalui mediasi atau negosiasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya untuk mengembangkan kelompok.

2) Peran dan Keterampilan Mendidik

Keterampilan mendidik memiliki peran untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, membagikan informasi, konfrontasi dan melakukan pelatihan bagi masyarakat. Dalam hal ini pendamping berperan sebagai actor yang mendorong perubahan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya.

3) Peran dan Keterampilan Representasi

Keterampilan representasi diartikan sebagai kemampuan fasilitator/pendamping dalam melakukan interaksi dengan dunia/jaringan luar

³³ Seorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 268

³⁴ Sriharini, *Bekal Fasilitator Handal*, hlm. 22-23

untuk berkoneksi dengan kelompok atau masyarakat. Keterampilan ini dapat diartikan sebagai membangun relasi terhadap berbagai komunitas, stakeholder terkait untuk membantu mengembangkan kelompok atau masyarakat. Representasi ini dapat membantu mengembangkan kelompok melalui sumberdaya, advokasi, relasi, branding dan lain sebagainya.

4) Peran dan Keterampilan Teknis

Dalam penyaluran informasi kepada kelompok atau masyarakat, para pendamping perlu memiliki keterampilan teknis seperti riset, menggunakan computer, presentasi verbal dan tertulis serta keterampilan dalam pengelolaan keuangan. Keterampilan teknik perlu dimiliki pendamping untuk membantu mengatasi berbagai persoalan yang bersifat teknis.

Menurut Sumpeno setidaknya terdapat 4 fungsi fasilitator, yaitu narasumber, trainer (pelatih), mediator dan dinamisator (penggerak).³⁵ Sumpeno berpendapat bahwa empat fungsi tersebut merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh fasilitator. Menurut Mardikanto terdapat 7 peran fasilitator/pendamping dalam pemberdayaan masyarakat³⁶:

1) Edukasi

Fasilitator dalam melakukan pemberdayaan berperan sebagai pendidik. Artinya fasilitator memiliki tugas untuk menyalurkan ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat.

2) Diseminasi informasi dan inovasi

Peran ini berkaitan dengan tugas pendamping untuk memberikan informasi atau inovasi kepada masyarakat atau sebaliknya.

³⁵ Ibid., hlm. 24

³⁶ Ibid., hlm. 30-31

3) Fasilitasi

Fasilitasi diartikan bahwa pendamping memiliki peran untuk membantu masyarakat menunjukkan dan mendapatkan kemudahan terhadap sumber daya yang diperlukan termasuk didalamnya peran mediator sebagai perantara antar pemangku kepentingan.

4) Konsultasi

Pendamping berperan sebagai penasehat dan memberikan alternative saran dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dampingan.

5) Advokasi

Advokasi memiliki peran berupa memberikan bantuan yang berkaitan dengan kebijakan antara kelompok bawah dan pemangku kebijakan.

6) Supervisor

Peran ini yaitu pendamping memiliki hak untuk mengeluarkan perintah atau pelaksanaan kegiatan advokasi dan program pemberdayaan masyarakat baik yang ditawarkan atau dilaksanakan masyarakat dampingan.

7) Monitoring dan Evaluasi

Peran ini berkaitan dengan melakukan pengamatan, pengukuran dan penilaian terhadap proses dan hasil dari pemberdayaan masyarakat, baik kegiatan yang masih berlangsung atau sebelum/sesudah dilakukan.

2. Pengertian Pemberdayaan UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung satu usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.³⁷ Dapat dikatakan UMKM merupakan usaha yang bukan bagian dari usaha lain dan dijalankan oleh perorangan ataupun sebuah badan usaha.

Berdasarkan pendapatan bersih yang didapatkan terdapat beberapa kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha dengan kekayaan atau pendapatan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk aset berupa tanah dan bangunan usaha, dengan omset paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)/tahun. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. Omset usaha kecil ini lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta maksimal Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Omset usaha menengah per tahun lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus ribu rupiah).

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Lebih luas pemberdayaan merupakan proses menuju keberdayaan atau proses untuk memperoleh kekuatan atau daya dari seseorang yang memiliki kemampuan kepada seseorang yang kurang memiliki kemampuan atau

³⁷ Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

kurang berdaya.³⁸ Studi Blickem berpendapat bahwa pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan diawali dengan usaha untuk mengembangkan potensi masyarakat dengan memberikan dorongan, peluang, kesempatan masyarakat yang diberdayakan sehingga menjadi berdaya dan mengembangkan potensinya.³⁹ Tujuan akhir dari sebuah pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat yang dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan solusi yang diberikan terhadap masalah tersebut. Masyarakat menjadi mandiri untuk memenuhi kebutuhan baik secara ekonomi, fisik maupun kebutuhan sosialnya. Dalam hal ini pemberdayaan diartikan sebagai usaha untuk perubahan sosial dan ekonomi yang terencana menuju ke arah yang lebih baik. Artinya, masyarakat yang sebelumnya kurang atau tidak berdaya menjadi berdaya setelah dilakukan pemberdayaan.⁴⁰

Pemberdayaan dalam hal ini merupakan pemberdayaan UMKM, yang dimana pemberdayaan ini memiliki tujuan agar para pelaku usaha UMKM dapat berdaya dan mengembangkan usahanya secara luas. Selain itu dapat memecahkan berbagai permasalahan terkait dengan pasar, produksi maupun distribusi. Hingga nantinya UMKM dapat berkembang dan bukan hanya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga semata tapi juga memberikan lowongan pekerjaan bagi orang lain.

3. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM menurut Suharto yaitu upaya menciptakan kondisi yang meningkatkan potensi UMKM untuk terus berkembang. Pemberdayaan ini dilakukan untuk memperkuat potensi UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh

³⁸ Ibid., hlm 5-6

³⁹ Beti Nur Hayati, "Powerfulness Komunitas: Refleksi Pendampingan Kelompok Tani pada Program Kampung Pisang", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4:1, 2020, hlm. 245

⁴⁰ Ibid.

dan mandiri. ⁴¹Dalam pemberdayaan UMKM terdapat indikator-indikator yang mencakup dua aspek yaitu aspek proses dan hasil. Aspek proses menunjukkan apakah selama produksi berlangsung dan proses penjualan telah sesuai dengan pedoman dan dijalankan secara konsisten oleh karyawan yang bertugas. Proses dalam UMKM meliputi perencanaan produksi, perencanaan fasilitas fisik produksi, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan pengendalian produksi, perencanaan dan pengendalian kualitas, tenaga kerja, bahan dan biaya. ⁴²Aspek hasil menunjukkan apakah proses produksi dan penjualan telah mencapai target yang ditetapkan (*output dan outcome*).⁴³

Indikator-indikator dalam keberhasilan pemberdayaan adalah sebagai berikut⁴⁴ :

a) Efektivitas

Efektivitas diartikan dengan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai atau belum. Efektivitas memiliki kaitan erat dengan rasionalitas teknik dan terukur dari unit produk, layanan atau nilai moneterinya. Pada produksi indikator yang dilihat adalah pencapaian target produk harian sudah tercapai atau belum.

b) Kecukupan

Kecukupan biasanya berkaitan dengan sejauh mana sebuah hasil tercapai mampu memecahkan masalah. Kecukupan ini berkaitan dengan dampak sebuah penerapan kebijakan. Indikator kecukupan dapat dilihat dari

⁴¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 60

⁴² Heriawan, *Buku Ajar Pengantar Bisnis*, Universitas, Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 66

⁴³ Dwiyanto Indoiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), hlm. 17

⁴⁴ Febry Eko Nurcahyo, "*Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Covid-19: Studi Pada Bakpia Madania di Yayasan Madania*", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2021).

apakah target produksi harian telah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat atau perlu diperbanyak.

c) Pemerataan

Indikator pemerataan dalam hal ini berkaitan dengan target produksi yang telah dicapai dapat memenuhi permintaan pasar atau belum. Selain itu, pemerataan ini berkaitan dengan biaya dan manfaat dalam pendistribusian terhadap masyarakat.

d) Responsivitas

Responsivitas dalam pemberdayaan ini berkaitan dengan apakah produksi mengakomodir saran dan masukan dari masyarakat atau dengan kata lain apakah produksi telah mampu memenuhi kemauan pasar dan masyarakat yang semakin berkembang. Hal ini penting karena dalam program pengembangan efektivitas, kecukupan dan pemerataan dapat dianggap kurang berhasil apabila tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara aktual.

e) Ketepatan

Indikator ketepatan ialah bagaimana hasil yang dicapai dapat bermanfaat atau tidak. Ketepatan dalam hal ini melihat mengenai nilai dan tujuan program, yaitu apakah konsumen atau masyarakat merasa puas dengan produk yang dihasilkan.

Menurut Suharto, aspek keberhasilan dalam sebuah pemberdayaan adalah ketika masyarakat berdaya menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek di atas, dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu 'kekuasaan di dalam' (power within),

‘kekuasaan untuk’ (power to), ‘kekuasaan atas’ (power over) dan ‘kekuasaan dengan’ (power with). Suharto merangkum indikator pemberdayaan menurut, yaitu⁴⁵:

a) *Kekuasaan di dalam (power within)*

Kekuasaan di dalam (*power within*) merupakan indikator keberdayaan. Diantara indikatornya adalah meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah. Dalam hal ekonomi kekuasaan di dalam meliputi kontribusi positif terhadap ekonomi dirinya, kehendak untuk memiliki ekonomi yang setara dan hak atas sumber yang ada di rumah tangga dan masyarakat. Kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan yaitu mampu meningkatkan kepercayaan diri dan kebahagiaan, harapan kesejahteraan yang setara.

b) *Kekuasaan untuk (power to)*

Indikator keberdayaan yang dilihat adalah keinginan dan kemampuan individu untuk berubah sehingga meningkatkan kesempatan akses seperti akses terhadap keuangan mikro, pasar, pendapatan, kepemilikan terhadap aset produktif dan rumah tangga, akses terhadap kesejahteraan dan kesehatan serta kemampuan untuk melewati hambatan yang dapat menghilangkan akses terhadap hukum, politik dan kebudayaan. Dalam hal pelaku UMKM kekuasaan untuk (*power to*) dapat diartikan sebagai indikator keberdayaan pelaku UMKM dapat mengakses berbagai modal, kepemilikan aset dan akses terhadap pemerintahan.

c) *Kekuasaan atas (power over)*

Indikator keberdayaan kekuasaan atas diantaranya adalah kekuasaan atau kemampuan menghadapi hambatan terhadap dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro. Indikator dalam perekonomian ialah kontrol terhadap pendapatan keluarga, aset produktif keluarga, dan kemampuan individu menghadapi

⁴⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 63-65

diskriminasi terhadap akses sumber dan pasar. Pelaku UMKM memiliki kemampuan kontrol terhadap pendapatan dan aset, serta mampu menghadapi tantangan akses pasar dan sumber.

d) Kekuasaan dengan (*power with*)

Indikator keberdayaan kekuasaan dengan meningkatnya rasa solidaritas bersama dengan orang lain dalam menghadapi hambatan pada tingkat rumahtangga, masyarakat dan makro. Dalam perekonomian mampu bertindak sebagai model peranan bagi orang lain, mampu memberikan gaji kepada orang lain, serta tindakan bersama dalam menghadapi diskriminasi terhadap akses sumber dan pasar. Power with juga dapat dilihat kemampuan mendapatkan dukungan dari berbagai jaringan untuk menghadapi krisis. Pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai hambatan bersama-sama pelaku UMKM bersama pendamping. Selain itu pendamping dan pelaku UMKM juga memiliki kemampuan menghadapi krisis, seperti krisis pandemi saat ini.

Indikator pemberdayaan menurut Edi Suharto yaitu:⁴⁶

1) Akses terhadap pelayanan keuangan mikro

Indikator ini berkaitan dengan adanya kemudahan akses terhadap layanan keuangan mikro untuk pengembangan usaha. Akses juga berkaitan dengan peran pendamping dan Dinas KUKMP dalam memberikan akses layanan keuangan mikro.

2) Akses terhadap pasar

Akses terhadap berkaitan dengan kemudahan pelaku UMKM di Kecamatan Butuh dalam memperluas pemasaran produk baik dan berjejaring di tingkat daerah maupun nasional.

⁴⁶ Ibid., hlm. 64

3) Mampu memberi gaji terhadap orang lain

Hal ini berkaitan dengan pemberdayaan UMKM dapat memberikan dampak terhadap peningkatan lapangan kerja, utamanya di masa pandemi ini ketika perusahaan besar banyak melakukan pemutusan hubungan kerja.

4) Kemampuan memenuhi kebutuhan

Indikator ini erat kaitannya dengan kemampuan pelaku UMKM dalam membeli komoditas kecil ataupun besar, yaitu mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari hingga membeli barang sekunder dan tersier.

5) Bertindak sebagai role model

Hal ini berkaitan dengan pelaku UMKM dapat memberikan motivasi dan dorongan terhadap orang lain untuk berwirausaha melalui UMKM.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjudul *Peran Pendamping Dinas KUKMP Pemberdayaan UMKM Sebelum dan Dimasa Pandemi Covid-19 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo*. Jenis penelitian yang akan dipilih oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁷ Maka dari itu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Dengan pendekatan ini peneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisis peran pendamping Dinas KUKMP dalam menjalankan pendampingan terhadap pelaku UMKM baik sebelum maupun

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosakarya, 2016), hlm. 6

sesudah pandemi secara holistic. Jenis penelitian ini dapat mempermudah peneliti dalam menggali informasi dan mendeskripsikan data penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Peneliti memilih tempat tersebut karena terdapat banyak pelaku UMKM, baik yang sudah ada sebelum pandemi maupun ketika pandemi Covid-19. Dinas KUKMP yang membantu para pelaku UMKM Kecamatan Butuh dalam mendampingi dan memberdayakan UMKM. Meskipun sebelum pandemi Covid-19 para pendamping melakukan pendampingan, namun saat ini tantangan untuk mendampingi UMKM dalam masa pemulihan ekonomi nasional. Dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti peran pendamping Dinas KUKMP dalam memberdayakan UMKM di Kecamatan Butuh.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber informasi (informan) yang dapat memberikan data sesuai penelitian yang akan dilakukan.⁴⁸ Subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pendamping Dinas KUKMP di Kecamatan Butuh, pelaku UMKM di Kecamatan Butuh dan Kepala Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tema yang akan menjadi studi atau fokus dalam penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah peran pendamping

⁴⁸ Febry Eko Nurcahyo, “*Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Covid-19: Studi Pada Bakpia Madania di Yayasan Madania*”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 22

⁴⁹ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya)* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 7-9

Dinas KUKMP dalam melakukan pemberdayaan sebelum dan di masa pandemic Covid-19 di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo.

5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan jangka waktu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data lapangan. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan yaitu 30 Maret 2022 hingga 29 Mei 2022. Dalam jangka waktu tersebut peneliti mengumpulkan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi kegiatan pendampingan UMKM Kecamatan Butuh sebelum pandemi dan selama pandemi tahun 2022. Peneliti memilih jangka waktu penelitian tersebut karena tertarik untuk meneliti perbedaan mengenai peran dan dampak pendampingan umkm di Kecamatan Butuh sebelum dan di masa pandemi covid-19.

6. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sample penelitian. Tujuan dari teknik sampling adalah untuk membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan yang mungkin dijumpai peneliti di lapangan, seperti populasi yang terlalu banyak atau terkendala keterbatasan waktu dan tenaga. Teknik sampling yang akan digunakan yaitu teknik pengambilan sampel *non-probability – purposive sampling*. Pada penelitian kualitatif tidak ada ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sampling*).⁵⁰ Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada kriteria atau pertimbangan peneliti terhadap sampel-sampel mana yang paling sesuai dan dianggap mewakili suatu populasi. Adapun kriteria yang dipilih peneliti berdasarkan penelitian ini adalah:

⁵⁰ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 224

- a. Pendamping Dinas KUKMP, sebagai pendamping UMKM di Kecamatan Butuh. Pendamping Dinas KUKMP Kecamatan Butuh berjumlah 2 orang yaitu Ibu Sari dan Ibu Istiqomah.
- b. Pelaku UMKM di Kecamatan Butuh, dalam hal ini merupakan pelaku UMKM yang terlibat dan didampingi oleh pendamping Dinas KUKMP Kecamatan Butuh. Peneliti mewawancarai 8 orang pelaku UMKM yang telah mendapatkan pendampingan baik sebelum maupun di masa pandemi Covid-19.
- c. Kasie. Kelembagaan Bidang UMKM Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo berjumlah 1 orang yaitu Bapak Nur Hadi Trionggo.

7. Sumber Data

Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.⁵¹ Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data:

a. Data Primer

Kata kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama.⁵³ Data primer merupakan data utama yang langsung didapatkan di lapangan. Data primer ini diperoleh dengan mengumpulkan dari informan melalui kegiatan wawancara dan/atau observasi di lapangan. Data primer dapat dicatat dalam sebuah catatan tertulis atau menggunakan media rekaman baik foto maupun video. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa

⁵¹ Ibid., hlm. 281

⁵² Ibid., hlm. 157

⁵³ Ibid.

wawancara kepada pendamping dan pelaku UMKM di Kecamatan Butuh, serta Kasie. Kelembagaan Bidang UMKM Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo. Peneliti juga menggunakan observasi dan dokumentasi di lapangan untuk mendukung hasil wawancara. Adapun informan sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. 1 Sumber Data Primer/Informan Utama

No	Informan	Keterangan
1	Ibu Sari	Pendamping UMKM Kecamatan Butuh
2	Ibu Istiqomah	Pendamping UMKM Kecamatan Butuh
3	Bapak Nur Hadi Trionggo	Kasie. Kelembagaan Bid. UMKM Dinas KUKMP Kab. Purworejo
4	Ibu Herni	Pelaku UMKM Kecamatan Butuh
5	Ibu Binarsih	Pelaku UMKM Kecamatan Butuh
6	Mba Luluk	Pelaku UMKM Kecamatan Butuh
7	Ibu Jum	Pelaku UMKM Kecamatan Butuh
8	Ibu Kengsi	Pelaku UMKM Kecamatan Butuh
9	Ibu Wakhidah	Pelaku UMKM Kecamatan Butuh
10	Ibu Heti Purnama Sari	Pelaku UMKM Kecamatan Butuh
11	Eka Oktaviani	Pelaku UMKM Kecamatan Butuh

*sumber diambil oleh peneliti

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua atau sumber di luar dari sumber utama. Data sekunder dapat berupa dari majalah, buku, jurnal, disertasi atau sumber lainnya di luar data utama yang dapat mendukung data primer.⁵⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan berbagai sumber data sekunder diantaranya jurnal, skripsi buku, artikel dan berbagai penelitian sebelumnya.

8. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi mengamati secara langsung dengan seksama. Metode pengumpulan data observasi ialah dengan melakukan pengamatan dengan seksama terhadap subjek dan lingkungan, yang kemudian dicatat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan menggunakan metode observasi peneliti dapat melihat dari sudut pandang subjek dan mampu merasakan dan menghayati yang dirasakan melalui sudut pandang subjek. Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Kecamatan Butuh, dengan mengamati pemberdayaan UMKM dan kegiatan yang dilakukan oleh para pendamping Dinas KUKMP.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* yang mengajukan pertanyaan

⁵⁴ Ibid.

dan *terwawancara* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁵ Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁵⁶ Penggunaan teknik ini bertujuan hasil lebih fokus dalam mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pendamping dan pelaku UMKM di Kecamatan Butuh, serta kepala Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang melibatkan data dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian.⁵⁷ Dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari teknik sebelumnya. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan sebagai pendukung teknik sebelumnya adalah menggunakan dokumentasi foto dan/atau video yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan UMKM di Kecamatan Butuh.

9. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian data (data teks seperti transkrip atau gambar/foto) untuk dianalisis, kemudian pengkodean dan peringkasan kode atau tema dengan mencari dan menemukan pola yang penting, dan terakhir penyajian data yang dapat berbentuk bagan, tabel atau pembahasan.⁵⁸ Dalam

⁵⁵ Ibid., hlm. 186

⁵⁶ Ibid., hlm. 190

⁵⁷ Ardiansyah, dkk, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *Jurnal Pendidikan Islam* Vol.1:2, 2023

⁵⁸ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.

penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data menurut Miles & Huberman yang memiliki komponen sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum dan mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan tema penelitian sehingga akan memberikan gambaran yang jelas mengenai data yang diperoleh.⁵⁹ Peneliti dalam melakukan reduksi data yaitu dimulai dengan menelaah dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian melakukan reduksi dengan mencatat rangkuman observasi dan pernyataan-pernyataan yang diperlukan,

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebuah kumpulan informasi yang telah disusun kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data dapat berupa table, teks naratif maupun gambar.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian kualitatif, dimana peneliti perlu melakukan verifikasi dalam segi kebenaran dan makna kesimpulan sesuai dengan yang telah disepakati dengan tempat penelitian. Proses penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti harus sesuai dengan penafsiran dari informasi yang telah diterima kacamata *key information*, bukan menggunakan penafsiran peneliti.

⁵⁹ Moh. Bagas Wahyu Pratama, “Program Sibakul Jogja Free-Ongkir: Mekanisme Dan Dampaknya Bagi UMKM Kota Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19”. Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2022)

10. Teknik Uji Keabsahan Data

Penelitian ini memerlukan adanya uji keabsahan yang bertujuan agar data yang didapatkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memastikan hal tersebut peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan pengecekan data yang didapatkan dari berbagai sumber teknik dan waktu. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi teknik dan sumber.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu pengecekan yang dilakukan dengan menguji kredibilitas data atau informasi dengan cara mengecek menggunakan alat dan waktu yang berbeda, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.⁶⁰ Triangulasi sumber yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu masing masing narasumber yaitu Pendamping Dinas KUKMP, pelaku UMKM dan Kasie. Kelembagaan Bidang UMKM Dinas Dinas KUKMP Kab. Purworejo.

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti, triangulasi sumber dilakukan dengan memvalidasi apa yang dikatakan narasumber melalui wawancara sesuai dengan data yang didapatkan melalui observasi dan dokumentasi atau sebaliknya.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi teknik yaitu pengecekan data dengan menggunakan sumber data yang sama tetapi dengan menggunakan teknik berbeda.⁶¹ Misalnya, data didapatkan melalui dokumentasi kemudian dicek kembali menggunakan observasi atau wawancara. Dalam penelitian yang akan

⁶⁰ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 330

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 331

dilakukan ini, triangulasi teknik yang akan dilakukan peneliti yaitu dengan mengecek kembali hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber dengan menggunakan teknik lain yaitu observasi dan/atau dokumentasi. Ataupun dapat dilakukan sebaliknya terhadap masing-masing narasumber.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab yaitu:

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II, berisi mengenai gambaran umum mengenai Kecamatan Butuh yang berisi letak geografis, batas wilayah, demografi penduduk, gambaran umum pendamping Dinas KUKMP, kegiatan dan program yang dilakukan.

BAB III, menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian yang sudah dilakukan, berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Pembahasan berbentuk teks narasi yang telah dicek kebenarannya dan akan dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini,

BAB IV, berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dari rumusan masalah mengenai “*Peran Pendamping Dinas KUKMP Dalam Pemberdayaan UMKM Sebelum dan Di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo*”, peneliti dapat menarik poin penting sebagai berikut:

1. Peran Pendamping Dinas KUKMP Dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Butuh

Peran pendamping Dinas KUKMP dalam melakukan pemberdayaan UMKM di wilayah Kecamatan Butuh sesuai dengan hasil penelitian dilaksanakan sebelum pandemi dan selama pandemic covid-19. Sebelum pandemic pendamping berfokus kepada peningkatan kualitas kemasan, legalitas dan pemasaran yang dapat dilihat melalui peningkatan penjualan, Dinas KUKMP melalui pendamping melakukan kegiatan memberikan semangat, fasilitasi kelompok, penyampaian informasi berkaitan dengan pelatihan dan acara-acara untuk promosi, memberikan pelatihan, membangun relasi dan peran dalam membantu administrasi Sementara itu, pendampingan selama pandemi covid-19 tidak sebanyak sebelum pandemi karena keterbatasan akibat peraturan pembatasan kegiatan sosial, maka peran pendamping yang dapat dilakukan selama pandemi covid-19 berfokus kepada mempertahankan eksistensi UMKM dengan memberikan fasilitasi bantuan UMKM, memberikan pelatihan yang berkaitan dengan upaya digitalisasi, dan membantu meningkatkan penjualan melalui sarana media sosial atau *online*.

2. Dampak Pendampingan UMKM di Kecamatan Butuh

Peran pendampingan yang dilakukan oleh pendamping Dinas KUKMP sebelum pandemi diantaranya memberikan dampak baik kepada UMKM diantaranya, kemudahan akses perizinan, peningkatan kualitas kemasan produk, meluasnya akses pasar melalui relasi, meningkatnya penjualan yang juga berdampak kepada peningkatan pendapatan. Sedangkan selama pandemi covid-19, peran pendampingan yang disesuaikan dengan keadaan berdampak kepada kemampuan umkm bertahan di masa pandemi melalui bantuan yang diberikan, adanya peningkatan kemampuan digitalisasi serta meluasnya akses pasar secara online. Namun demikian, dampak pendampingan selama pandemi tidak dapat maksimal karena kurangnya kemampuan pelaku umkm serta kurangnya tindak lanjut dalam proses digitalisasi.

Dari poin-poin di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa dalam proses pemberdayaan UMKM di wilayah Kecamatan Butuh melalui pendamping Dinas KUKMP memiliki peran yang signifikan, bagi pelaku UMKM baik sebelum pandemi maupun selama pandemic Covid-19. Sebelum pandemi, banyak pendampingan yang dapat dilaksanakan secara maksimal, namun dalam kondisi pandemi proses pemberdayaan perlu menyesuaikan dengan keadaan yang terbatas, menjadikan pendamping Dinas KUKMP harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang dibutuhkan oleh UMKM dengan memberikan pendampingan yang bertujuan untuk tetap mempertahankan eksistensi UMKM yaitu dengan fasilitasi bantuan, pelatihan digitalisasi dan usaha peningkatan penjualan melalui media online. Secara keseluruhan, pendampingan UMKM di Kecamatan Butuh memberikan manfaat baik yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku UMKM. perlu memaksimalkan tindak lanjut hasil pelatihan dan pendampingan

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak terkait, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purworejo

Dinas KUKMP menyadari kekurangan pelaku UMKM di wilayah Purworejo secara umum yang kebanyakan masih berada pada level mikro dan masih mengalami masa kritis dalam berbisnis, sehingga mudah mengalami kegagalan. Dinas KUKMP sebagai stakeholder yang menaungi pemberdayaan di wilayah Kabupaten Purworejo secara umum, memberikan program yang dapat meningkatkan kualitas UMKM sehingga dapat berkembang. Dinas KUKMP telah memberikan berbagai macam pelatihan, pendampingan serta kerjasama yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelaku dan produk, sehingga dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Dinas KUKMP juga telah memberikan berbagai pelatihan dan kerjasama berbasis digital untuk membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas produk dan memaksimalkan pemasaran secara online. Namun, berbagai pelatihan ini seringkali tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan kurangnya maksimalnya pendampingan lanjutan dari pelatihan, kemampuan pelaku UMKM yang berbeda-beda. Selain itu, UMKM juga mengalami masa pandemi yang banyak berimbas kepada UMKM diantaranya pemasaran yang beralih melalui online. Terkait dengan hal tersebut, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis memberikan beberapa saran kepada Dinas KUKMP, yaitu

1. Peningkatan Kemampuan Digitalisasi melalui pelatihan berkelanjutan dan intensif, yaitu Dinas KUKMP memberikan pelatihan yang difokuskan kepada keterampilan digital, penggunaan e-commerce, pemasaran secara online. Pelatihan ini juga

memerlukan pendampingan tindak lanjut secara intensif sampai pelaku UMKM mampu dan mahir dalam penggunaan tersebut

2. Memaksimalkan program yang sudah ada yaitu memaksimalkan fungsi Rumah BUMN sebagai sarana inkubasi bisnis, pemasaran dan bimbingan. Program QRIS dan Padi UMKM perlu dimaksimalkan baik dalam segi peningkatan kualitas QRIS maupun website Padi UMKM agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat secara umum dan dapat meningkatkan penjualan. Selain itu, Dinas KUKMP juga perlu memaksimalkan kolaborasi dengan sector swasta maupun pariwisata untuk membantu promosi produk UMKM agar lebih dikenal oleh masyarakat di luar warga Purworejo
 3. Monitoring dan Evaluasi secara berkala, melalui pendamping UMKM, Dinas KUKMP perlu membuka evaluasi berkala terhadap berbagai program dan pelatihan yang telah dilaksanakan kepada pelaku UMKM, sehingga kedepannya pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.
2. Pendamping Dinas KUKMP

Pendamping Dinas KUKMP Kecamatan Butuh dalam melaksanakan pendampingan telah memberikan dampak yang positif bagi pelaku umkm secara umum, Namun, pendamping dalam beberapa hal masih belum maksimal, seperti kurangnya peran pendamping dalam strategi pemasaran di masa pandemi yang belum maksimal dalam mendampingi tindak lanjut pelatihan digitalisasi. Tanpa mengurangi rasa hormat, peneliti memberikan saran kepada pendamping yaitu

- a. Pelaku UMKM Kecamatan Butuh dalam proses digitalisasi belum dapat maksimal karena kurangnya pendampingan tindak lanjut maka diharapkan pendamping Dinas KUKMP Kecamatan Butuh untuk meningkatkan kemampuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan proses digitalisasi seperti

kursus atau workshop yang dapat berpraktik secara langsung untuk meningkatkan kemampuan digitalisasi pendamping utamanya dalam bermedia sosial, marketplace dan alat digital lainnya agar dapat mendampingi UMKM dalam upaya proses digitalisasi UMKM di Kecamatan Butuh. Selain itu, pendamping Dinas KUKMP juga dapat membantu fasilitas akses teknologi, seperti pusat layanan digital yang dapat berbentuk dukungan teknis bagi pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan menjalankan usaha secara online dengan pasar yang lebih luas. Hal ini juga berkaitan dengan perlunya pendamping dalam berjejaring dan berkolaborasi baik dengan lembaga Pendidikan maupun perorangan untuk membantu kolaborasi dalam peningkatan kemampuan digitalisasi baik bagi pelaku UMKM Kecamatan Butuh maupun Pendamping Dinas KUKMP.

3. Kepada Pelaku UMKM Kecamatan Butuh

Pelaku umkm Kecamatan Butuh yang telah mendapatkan pendampingan telah mendapatkan dampak baik dari pendampingan, baik dari segi kemampuan diri, kualitas kemasan dan peningkatan penjualan. Namun, demikian penulis masih melihat kurangnya semangat pelaku umkm dalam meningkatkan usaha yang dimiliki. Penulis memberikan saran kepada pelaku umkm, untuk dapat berfokus dalam melaksanakan serta mau mengaplikasikan pelatihan yang telah didapatkan serta melakukan evaluasi terhadap hasil implementasi yang telah dilakuakn, memperluas pasar bukan hanya secara luring tetapi juga secara daring dengan menjaga komunitas UMKM sdan berkolaborasi serta melakukan promosi digital, meningkatkan motivasi dan semangat dalam membangun usahanya, mengoptimalkan kualitas dan inovasi produk yang dimiliki, seperti dengan membuat varian baru, memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan, seperti pendampingan oleh Dinas KUKMP dan program-program yang ada

di dalamnya, serta pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kemampuan digital karena untuk menemukan peluang baru yang tidak dapat ditemukan secara luring.



DAFTAR PUSTAKA

Afriadi, “*Peranan Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung*”, Thesis, Lampung: Program Pascasarjana, UIN Raden Intan, 2018

Anhar, Moh., “*UMKM Jawa Tengah di Pusaran Pandemi*”, <https://mie.feb.undip.ac.id/archives/17245>, diakses tanggal 30 Desember 2021

Arifudin, Opan dkk., “Pendampingan UMKM Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Dan Hasil Penjualan Opak Makanan Khas Jawa Barat”, *Jurnal Karya Abadi*, Vol. 4:1 2020

Caherani, Diah, Melda Noereast Talytha, Tony Perdana, Endang Rusyaman dan Nurul Gusriani, “Pemetaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Analisis Media Sosial Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan”, *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 9:4, Desember 2020

Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Purworejo, https://bpbd.purworejokab.go.id/download/file/Laporan_Paripurna_Covid-192_.pdf, diakses tanggal 11 Januari 2021

Hamzah, Liez Maria dan Devi Agustin, “Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8:2, 2019

Hasanah, Uswatun, *Pemberdayaan Petani Penderes Nira Melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Lokal Pedesaan Oleh Koperasi Wanita Srikandi (Studi di Desa Ngasinan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)*, Skripsi, (Semarang: Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2020),

Hayati, Beti Nur , “Powerfulness Komunitas: Refleksi Pendampingan Kelompok Tani pada Program Kampung Pisang”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4:1, 2020

Heriawan, *Buku Ajar Pengantar Bisnis*, Universitas, Sumatera Utara, Medan, 2014

Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analysis*, Yogyakarta: Gava Media, 2009

Jayani, Dwi Hadya, “*Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Terus Meningkat*”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi-terus-meningkat>, diakses tanggal 11 Januari 2021

Jefriando, Maikel, “*Pak Jokowi Tolong! Situasi UMKM RI Masih Kritis*”, <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20211209104437-25-297878/pak-jokowi-tolong-situasi-umkm-ri-masih-kritis>, diakses tanggal 25 Desember 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peran>, diakses tanggal 11 Januari 2021

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosakarya, 2016

Nurchahyo, Febry Eko, “*Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Covid-19: Studi Pada Bakpia Madania di Yayasan Madania*”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2021

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Pratama, Bima Cinintya dkk., “*Pendampingan UMKM dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terdampak Pandemi Covid-19 Di Area Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto Dalam Menjalankan Contactless Bussiness*”, *Jurnal Budimas*, Vol. 3:1, 2021

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya)* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

Rahma, Meida Nur, “*Pengaruh Pelatihan, Pendampingan dan Pembinaan Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Pendapatan UMKM (Studi Pada Peserta Home Bussiness Camp*”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2018

Satgas Covid, <https://covid19.go.id/>, diakses tanggal 20 Desember 2021

Setaindini, Yudia, “*Pandemi Setahun, Pelaku UMKM Purworejo Tambah 4 Ribu Orang*”, <https://purworejonews.com/2021/03/10/pandemi-setahun-pelaku-umkm-purworejo-tambah-4-ribu-orang/> diakses tanggal 26 Desember 2021

Sriharini, *Bekal Bekal Fasilitator Handal Membangun Masyarakat Sejahtera*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2020

Sudjatmiko, Tomy, “*24 Ribu UMKM di Purworejo Terdampak Covid-19*”, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/kebu/24-ribu-umkm-di-purworejo-terdampak-covid-19/>, diakses tanggal 28 Desember 2021

Sudjinan dan Juwari, “*Pemberdayaan Potensi Masyarakat Melalui Pendampingan UMKM dan Koperasi di Kelurahan Telaga Sari Kota Balikpapan*”, *Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Ekonomi*, Vol. 1:1 2018

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Suhimbing Namora, Nivfitri Landong dan Raden Hasan, “*Analisa Kinerja Pendamping Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Terhadap Kemajuan UMKM*”, *JIM UPB*, Vol. 7:2, 2019

Syahrial, “*Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia*”, *Jurnal Ners*, Vol. 4:2, 2020

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Wahyuningsih,i Wahyuningsih, *Komunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo Dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Alun-alun Purworejo Tahun 2017-2018)*, Skripsi, (Yogyakarta, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).

Wijayanto, Hargo Dwi, “*Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan*”, Skripsi (Ponorogo: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019)

<http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%20II%20TESIS.pdf>

<http://digilib.uinsby.ac.id/18163/5/Bab%202.pdf>,

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Rahma Afni Ardhiyani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 06 Juni 2000
Alamat Asal : RT 03/RW02 Wareng, Butuh,
Purworejo
Alamat Tinggal : -
Email : rahmaafniardhiyani@gmail.com
No. HP : 0895-3430-78399



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK Mardisiwi Utami	2007
SD	MI Islamiyah Wareng	2012
SMP	SMPN 28 Purworejo	2015
SMA	SMAN 2 Purworejo	2018
S1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2024

C. Pengalaman Pekerjaan

- Praktik Pengembangan Masyarakat (PPM)/Magang di Dinas Sosial Kabupaten Purworejo
- Praktik Pengembangan Masyarakat (PPM)/Magang di LKiS Yogyakarta
- Kpop4Planet Ambassador 2021
- Asisten Penelitian Sosial Mapping SODEC 2022
- Petugas Pendataan Lapangan (PPL) Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022
- Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Serentak 2024
- Panitia Pengawas Kecamatan Pemilihan Serentak 2024

D. Pengabdian Masyarakat

- Kuliah Kerja Nyata (KKN) 105
- Sekretaris Karang Taruna Tunas Dewa (Desa Wareng)